

ANALISIS MASALAH PUBLIK PADA FASILITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA

(Tengku Abdi Pratama, S.A.N. NPM 2526061020, MIA , Universitas Lampung)

Pendidikan merupakan salah satu unsur fundamental dalam pembangunan manusia dan menjadi indikator penting bagi kemajuan suatu bangsa. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, diperlukan tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai, mencakup sarana fisik seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, sanitasi, serta sarana penunjang seperti akses teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Fasilitas pendidikan berfungsi sebagai prasyarat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif, aman, dan kondusif.

Namun, kondisi fasilitas pendidikan di Indonesia hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai laporan resmi menunjukkan adanya ketimpangan signifikan dalam ketersediaan dan kualitas fasilitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara daerah maju dengan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Banyak sekolah mengalami kerusakan fisik seperti ruang kelas yang tidak layak, kurangnya akses air bersih, sanitasi yang buruk, serta keterbatasan peralatan laboratorium dan media pembelajaran modern. Selain itu, era transformasi digital menuntut penggunaan perangkat TIK sebagai sarana pendukung pembelajaran, namun ketersediaan internet dan perangkat digital masih jauh dari merata.

Ketimpangan dan keterbatasan fasilitas pendidikan tersebut telah menjadi **masalah publik**, karena dampaknya tidak hanya dirasakan pada level individual peserta didik dan sekolah, tetapi berdampak luas pada kualitas sumber daya manusia, kesenjangan sosial, hingga daya saing nasional. Ketidakmerataan fasilitas pendidikan berpotensi memperbesar disparitas hasil belajar (learning outcomes) antar wilayah, menurunkan motivasi belajar peserta didik, serta menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya pada indikator pendidikan berkualitas (SDG 4).

Meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar minimal 20% dari APBN dan APBD, berbagai kajian menunjukkan bahwa pengelolaan, distribusi, dan efektivitas penggunaan anggaran pada sektor fasilitas pendidikan belum optimal. Tantangan tata kelola, perbedaan prioritas pemerintah daerah, serta lemahnya monitoring dan evaluasi menyebabkan penyediaan fasilitas pendidikan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan faktual di lapangan. Kondisi ini mempertegas bahwa persoalan fasilitas pendidikan bukan hanya isu teknis, tetapi juga persoalan struktural dan kebijakan publik.

Melihat kompleksitas dan urgensi permasalahan tersebut, penting untuk melakukan kajian ilmiah mengenai fasilitas pendidikan sebagai masalah publik. Kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai akar masalah, dampak, serta arah kebijakan yang dapat menjadi solusi strategis untuk meningkatkan pemerataan dan kualitas fasilitas pendidikan di Indonesia.

Masalah utamanya adalah :

1. Ketidakmerataan dan rendahnya kualitas fasilitas pendidikan di Indonesia.

Masalah ini mencakup kurangnya sarana fisik yang layak, keterbatasan akses teknologi, serta ketimpangan antara wilayah perkotaan–pedesaan dan daerah maju–3T.

2. Faktor Struktural

- **Perbedaan kapasitas fiskal antar daerah** sehingga alokasi anggaran untuk pendidikan tidak merata.
- **Keterbatasan regulasi dan standar fasilitas pendidikan** yang belum sepenuhnya terpenuhi oleh seluruh sekolah.
- **Kesenjangan infrastruktur dasar** seperti listrik, air bersih, dan jaringan internet di daerah terpencil.

3. Faktor Tata Kelola

- **Manajemen anggaran pendidikan yang belum efektif**, termasuk perencanaan dan implementasi pembangunan fasilitas.
- **Lemahnya pengawasan dan monitoring**, menyebabkan banyak fasilitas rusak tidak segera diperbaiki.
- **Ketidaktepatan prioritas pemerintah daerah** dalam menetapkan program infrastruktur pendidikan.

4. Faktor Sosial dan Ekonomi

- **Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah**, terutama di daerah pedesaan dan 3T, sehingga sulit mendukung keberlanjutan fasilitas sekolah.
- **Kesenjangan digital**, baik dari sisi akses maupun kompetensi.

3. Gejala atau Manifestasi Masalah (Symptoms)

Masalah utama tampak dalam bentuk:

- Banyak ruang kelas mengalami kerusakan ringan hingga berat.
- Toilet sekolah tidak layak pakai dan minim air bersih.
- Laboratorium, perpustakaan, dan ruang praktik tidak memenuhi standar.
- Minimnya perangkat TIK seperti komputer, proyektor, dan jaringan internet.
- Ketidaksesuaian jumlah ruang kelas dengan jumlah siswa (overcrowded classrooms).
- Peralatan pembelajaran yang usang atau tidak tersedia.

Gejala ini adalah indikator empiris yang menunjukkan bahwa fasilitas pendidikan belum memenuhi kebutuhan pembelajaran. dan Pihak yang Terlibat pada kasus ini (Stakeholders) diantaranya : Peserta didik, guru dan tenaga kependidikan dan sekolah

Dan pihak yang Bertanggung Jawab ialah :

1. Pemerintah pusat (Kemendikbud, Kemenkeu)
2. Pemerintah daerah
3. DPR/DPRD sebagai pengawas kebijakan anggaran
4. Komite sekolah dan masyarakat
5. Dunia usaha (peran CSR)

Serta solusinya adalah

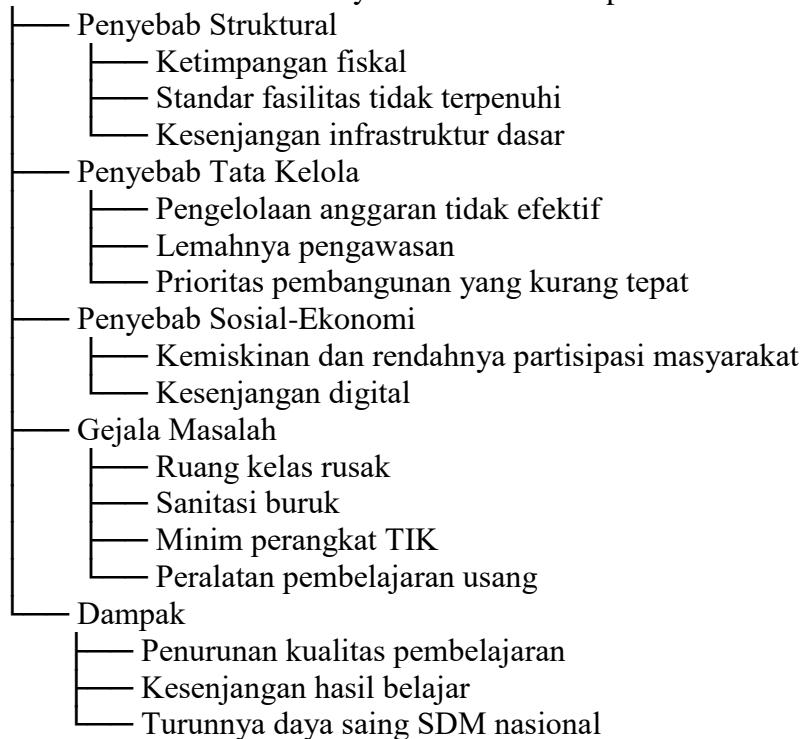
Meski analisis mendalam dibahas pada bab lain, strukturisasi masalah harus menyinggung alternatif solusi awal, seperti:

- Pemerataan anggaran dan penguatan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan.
- Penerapan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data untuk pendataan kerusakan fasilitas.
- Pembangunan fasilitas digital dan percepatan pemerataan internet.
- Kolaborasi pemerintah-swasta melalui skema CSR dan kemitraan pendidikan.
- Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan infrastruktur pendidikan.

7. Struktur Masalah dalam Bentuk Diagram Hirarki (Logical Problem Structure)

Masalah Utama:

Ketidakmerataan dan rendahnya kualitas fasilitas pendidikan



Dari data diatas terlihat bahwa Ketidakmerataan dan rendahnya kualitas fasilitas pendidikan memiliki banyak indikatornya mulai dari Penyebab Struktural, Penyebab Tata Kelola dan

Sosial-Ekonomi. Dibawah ini juga penulis memberikan kebijakan untuk mengatasinya dengan cara :

1. **Dana Alokasi Khusus (DAK) Fasilitas Sekolah Terfokus:** Alokasi berbasis kebutuhan tertimbang (indikator: kondisi bangunan, rasio siswa/ruang, akses air/listrik).
2. **Dana Pemeliharaan Sekolah (endowment/maintenance fund):** Transfer tahunan terikat untuk pemeliharaan rutin.
3. **Skema Matching Fund Pemerintah–Pemda–Masyarakat:** Memotivasi kontribusi lokal (uang atau tenaga) untuk percepatan perbaikan.
4. **Insentif CSR & Skema PPP:** Pajak insentif atau pengakuan untuk perusahaan yang membiayai fasilitas sekolah, kemudian juga melalui Regulasi & Standar : **Standard Nasional Fasilitas Sekolah (SNFS):** Standar minimum untuk ruang kelas, sanitasi, akses TIK, listrik, keselamatan bangunan, dan aksesibilitas dan **Kewajiban Pelaporan & Audit:** Sekolah wajib melaporkan kondisi fasilitas setiap tahun ke sistem pusat.
5. **Penguatan Kapasitas Pemda & Pengelola Sekolah:** Pelatihan perencanaan anggaran, pemeliharaan, dan pengadaan.
6. **Unit Pemantau Fasilitas (di tingkat kabupaten/provinsi):** Fungsi teknis untuk inspeksi, prioritisasi, dan verifikasi pengerjaan.
7. **Sistem Informasi Fasilitas Sekolah (SIFS):** Pemetaan (GIS) + dashboard nasional yang memuat kondisi, rencana perbaikan, dan realisasi anggaran.
8. **Platform Perawatan / Hotline Pengaduan:** Pengaduan kerusakan real-time yang tertaut ke mekanisme penanganan.

Daftar Pustaka

- Ainley, J., & Carstens, R. (2018). *Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2018 Results*. OECD Publishing.
- Asian Development Bank. (2019). *Indonesia Education Sector Assessment*. ADB.
- Bappenas. (2020). *Laporan Pembangunan SDM Indonesia*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dharma, S. (2019). Analisis kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar di Indonesia. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 26(2), 123–140.
- Hanushek, E., & Woessmann, L. (2015). *The Knowledge Capital of Nations: Education and the Economics of Growth*. MIT Press.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Nasional*. Kemendikbudristek.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Standar Nasional Pendidikan*. Badan Standar Nasional Pendidikan.
- Kemdikbud. (2019). *Evaluasi Fasilitas Pendidikan Nasional*. Pusat Data dan Statistik Pendidikan.
- Lewis, B. D. (2017). Local government capital spending in Indonesia: Politics, public service delivery, and corruption. *World Development*, 93, 47–66.
- OECD. (2019). *Education at a Glance 2019: OECD Indicators*. OECD Publishing.
- Prastowo, A. (2021). Pengaruh sarana dan prasarana terhadap kualitas proses pembelajaran di sekolah dasar. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(1), 45–56.
- Pritchett, L. (2013). *The Rebirth of Education: Schooling Ain't Learning*. Center for Global Development.
- UNESCO. (2021). *Education for All Global Monitoring Report*. UNESCO Publishing.
- UNICEF. (2020). *WASH in Schools Global Report*. UNICEF.
- World Bank. (2020). *Indonesia Public Expenditure Review: Education Sector*. World Bank Group.

World Bank. (2018). *Learning to Realize Education's Promise*. World Development Report 2018.